

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) TEHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT/UPPD
PEMATANGSIANTAR)**

OLEH

ANGGUN CITRA DILLA

NIM. 0502162147

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEMATANGSIANTAR
(STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT/UPPD PEMATANGSIANTAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Meraih

Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH

ANGGUN CITRA DILLA

NIM. 0502162147

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEMATANGSIANTAR
(STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT/UPPD PEMATANGSIANTAR)**

Oleh


Anggun Citra Dilla

NIM. 0502162147

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Juli 2020

Pembimbing I



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN. 2010057302

Pembimbing II



Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN. 2010057302

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat UPPD Pematangsiantar)**”. An. Anggun Citra Dilla, NIM 0502161044 Program Studi

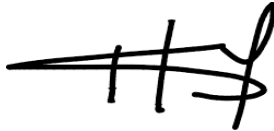
Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 25 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 11 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua,



(Hendra Harmain, SE, M.Pd)

NIDN. 2010057302

Sekretaris,



(Kusmilawaty, M.Ak)

NIDN. 2014068001

Anggota



1. (Dr. Maliyah, MA)

NIDN.2026017602



2. (Laylan Syafina, SE, M.S)

NIDN. 2027089103



3. (Hendra Harmain, SE, M.Pd)

NIDN. 2010057302



4. (Nurwani, M.Si)

NIDN. 0126038901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, M.A

NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar)**” atas nama **Anggun Citra Dilla**. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak **Hendra Harmain, SE, M.Pd** dan Pembimbing II Ibu **Nurwani, M.Si**.

Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan suatu instansi atau lembaga Pemerintah yang memiliki tugas pokok meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar, menganalisa bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematang Siantar dan menganalisa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematangsiantar setelah dibagi hasil pada tahun 2015-2019 mengalami naik turun dan tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Tidak mencapai target dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya dan ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil dan berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup baik, walaupun mengalami naik turun sejak tahun 2015-2019. Kontribusi yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dimana Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten hanya menerima 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungutnya.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Baik sumbangan pikiran, materi, waktu, tenaga yang terurah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada: Yang tercinta kedua orang tuaku Ayahanda Supriadi dan Ibunda Nur'ainun, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang yang tulus, materi dan didikan serta pengorbanan yang tak ternilai harganya. Yang selalu memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Dan secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Nurlaila, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus sebagai Pensehat Akademik dan Pembimbing I saya yang dengan sabar mengorbankan waktunya dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Kusmilawati, SE, M.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Nurwani, M.Si, selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Seluruh staff pegawai di Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar yang telah memberikan izin penelitian di tempat ini.
11. Adik-adikku tersayang Putri, Gilang dan Angga yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta canda tawa yang menjadi semangat bagi penulis.
12. Sahabat Bowling (Tasya dan Liza) berteman dari masa SMA sampai sekarang. Terima kasih sudah menemani, memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk penulis, semoga sahabat hingga jannah.
13. Sahabat Rocob (Meli, Hayati, Dwi) yang telah sama-sama berjuang dan belajar demi menempuh gelar S.Akun, yang selalu memberikan dukungan, canda dan tawa. Terima kasih telah membuat kenangan manis selama kuliah.
14. Teman seperjuangan Akuntansi Syariah khususnya kelas AksC-2016, yang sling memberi motivasi dan nasehat serta dukungan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua yang telah diberikan.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi ini

sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita pada umumnya. Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 13 Juli 2020

Penulis

ANGGUN CITRA DILLA

NIM. 0502162147

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABELix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Akuntansi	8
1. Pengertian Akuntansi	8
2. Bidang-Bidang Akuntansi	8
3. Akuntansi Perpajakan.....	11
4. Akuntansi Menurut Islam	11
B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	14
1. Pajak Daerah	14
2. Retribusi Daerah.....	15
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	20
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20
C. Tinjauan Tentang Pajak	21
1. Pengertian Pajak	21

2. Pajak Menurut Islam	22
3. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Defenisi Pajak	24
4. Fungsi Pajak	24
5. Jenis Pajak	25
6. Syarat Pemungutan Pajak	29
7. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	30
D. Tinjauan Tentang Pajak Daerah	32
1. Pengertian Pajak Daerah	32
2. Objek Dan Tarif Pajak Daerah	34
3. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah.....	35
4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	37
E. Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor	38
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	38
2. Sejarah Pajak Kemdaraan Bermotor	38
3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	39
4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	39
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	40
6. Jenis Kendaraan Bermotor	41
7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	45
F. Kajian Terdahulu	47
G. Kerangka Berfikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	59

A. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	59
1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	59
2. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	62
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	62
4. Gambaran Umum Pegawai	65
B. Deskripsi Data	67
1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	67
2. Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus Kota Pematangsiantar	68
3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	69
4. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar	71
5. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pematangsiantar Setelah Bagi Hasil	72
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar	73
7. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar	74
C. Hasil Penelitian	75
1. Ketentuan Daerah Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	75
2. Jumlah Dan Jenis Kendaraan Bermotor	76
3. Program-Program Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	77
4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	78
5. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lainnya	79
6. Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	80
7. Sistem Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	80
8. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Setelah Bagi Hasil	81
D. Pembahasan	82
1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019 Di Kota Pematangsiantar	82

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 Di Kota Pematangsiantar....	83
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar.....	3
1.2	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar.....	4
1.4	Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Pematangsiantar	68
1.6	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	69
1.7	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	72
1.8	Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.....	73
1.9	Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar	74

DAFTAR GAMBAR

1.2	Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Pematangsiantar	69
1.5	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Bagi Hasil	73
1.7	Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan	
	Asli Daerah	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang berkembang saat ini otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal, pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukan sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diperlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing-masing daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat, khususnya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis dan mempunyai peranan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi atas beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

¹ Muhammad Muchtar, et. al., "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara" dalam Jurnal Ilmu ekonomi Vol.1 Jilid 1, 2017, h. 385-399

masyarakat sesuai dengan peraturan daerah.² Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, diatur bahwa jenis pajak yang provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang kompeten dimana dapat memberikan sumbangsih yang tinggi kepada daerah, ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor, khususnya di wilayah kota Pematangsiantar. Pertambahan jumlah pengendara bermotor merupakan salah satu keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.³

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salahh satu potensi penerimaan pendapatan daerah yang cukup besar. Pada umumnya setiap tahunnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor semakin meningkat karena kendaraan bermotor sangat menunjang kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

² Uma Devi, “*Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Serdang Bedagai*”, (Tugas Akhir, FISIB Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), h. 1

³ Natalia Ester Rompis, et. al., “*Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*” dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No.03, 2015, h. 1

Tabel 1.1

**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD
Pematangsiantar**

Tahun	Jumlah
2015	150.501
2016	152.139
2017	149.433
2018	144.103
2019	144.154

Sumber: Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar, 2020

Berdasarkan data Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar tersebut jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan tahun 2015-2019, jumlah kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar meningkat pesat pada tahun 2016. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 150.501 kendaraan. Dari jenis kendaraan sedan, jeep, bus, micro bus, mini bus, *truck/pick up*, betor, sepeda motor/roda dua dan kendaraan alat-alat berat. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi 152.139 kendaraan, dan meningkat sebanyak 1.638. sedangkan pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor menurun menjadi 149.433 kendaraan, mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 menjadi 144.103 kendaraan dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2019 dari 144.103 menjadi 144.154 kendaraan.

Dengan meningkatnya jumlah perkembangan kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar diharapkan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Jika laju pertumbuhan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka pemerataan hasil pembangunan untuk kemakmuran masyarakat dapat dicapai. Namun tidak dapat dipungkiri juga dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka semakin tinggi juga tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut Kantor Bersama Samsat/ UPPD Pematangsiantar mencatat jumlah kendaraan bermotor yang paling tinggi jumlah penunggakannya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 26.601, hal ini bersamaan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2016 dari 150.501 pada tahun 2015 menjadi 152.139.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti berkurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan berkurangnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor. Dengan berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi yang dipungut oleh setiap daerah kabupaten/kota. Hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh setiap daerah kabupaten/kota maka akan dibagi hasil untuk pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan instansi pemerintah yang bertugas memungut pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut akan dibagi hasil untuk Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

Tabel 1.2

**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD
Pematangsiantar**

Tahun	Target	Realisasi
2015	67.257.428.583	64.931.898.502
2016	69.781.386.031	69.723.604.659
2017	72.634.737.851	78.248.169.833
2018	74.661.357.873	84.763.346.802
2019	82.280.690.086	83.172.413.280

Sumber: Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, 2020

Menurut data Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar di atas, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 dan 2016 realisasinya tidak mencapai target. Pada tahun 2017-2019 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat di saat jumlah kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya penetapan tarif pajak sesuai dengan jenis kendaraan bermotor dan adanya denda penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal-hal yang menyebabkan jenis kendaraan bermotor dapat

mempengaruhi besarnya tarif pajak kendaraan dan faktor-faktor lain yang belum diketahui dikarenakan kurangnya edukasi masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor. Dan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target setelah dibagi hasil untuk Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Hal ini kemungkinan dikarenakan lebih banyak masyarakat Kabupaten Simalungun yang membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor Bersama UPT DISPENDASU Pematangsiantar. Sehingga penerimaan bagi hasilnya lebih besar untuk wilayah Kabupaten Simalungun dibandingkan untuk wilayah Kota Pematangsiantar. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tidak mencapai target.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Riyana Waqiah (2017) dengan judul Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2008 (dimulai layanan Drive Thru) sampai dengan 2016 selalu mengalami perubahan naik turun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ST. Nur Radia (2017) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini yaitu kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 berada dalam kategori sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Prasetya (2018), dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya yaitu bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai target di saat jumlah kendaraan bermotor menurun, bagaimana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar setelah di bagi

hasil. Oleh karena itu, penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan judul “ *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar pada tahun 2015-2016 tidak mencapai target.
2. Kurangnya informasi mengenai perhitungan bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat/UPPD Pematangsiantar.
3. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar tidak mencapai target.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar.
2. Bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dianalisa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk menganalisa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar.
2. Untuk menganalisa bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematang Siantar?
3. Untuk menganalisa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis, menambah wawasan dari pengetahuan yang lebih luas dalam mendapatkan pengetahuan tentang kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi Akademis, menambah perbendaharaan perpustakaan sehingga dapat acuan mahasiswa yang akan mendapatkan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan Analisis Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.
3. Bagi pembaca, sebagai masukan dan pertimbangan yang nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam membuat *paper* di tahun-tahun mendatang yang berkaitan dengan Analisa kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi pada umumnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi.⁴

Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Akuntansi adalah urutan proses kegiatan mencatat, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.⁵

2. Bidang-Bidang Akuntansi

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para Akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang penting dijelaskan sebagai berikut:

⁴ Alfurkaniati, et. al., *Pengantar Akuntansi 1*, (Medan : PENERBIT MADENATERA, 2016) , h. 5

⁵ Natalia Ester Rompis, et.al., “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada samsat Airmadidi)” dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.15 No.03, 2015, h.53.

a. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan disebut juga Akuntansi Umum (*General Accounting*), yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun ekstern perusahaan.

b. Akuntansi Managerial

Akuntansi manajerial menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang. Bidang ini mengolah kasus-kasus khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi.

c. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan bidang khusus yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya.

d. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*enviromental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*).

e. Akuntansi Perpajakan

Bidang akuntansi perpajakan mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan.

f. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah bidang khusus akuntansi yang berhubungan dengan penciptaan suatu prosedur akuntansi dan peralatannya disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan.

g. Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi adalah bidang kegiatan akuntansi yang khusus melakukan pemeriksaan secara bebas atau umum.

h. Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan sendiri merupakan suatu bidang yang baru, yang secara luas berhubungan dengan perilaku seseorang, kelompok ataupun organisasi, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan.

i. Akuntansi Internasional

Akuntansi internasional merupakan bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah-masalah perdagangan-perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional.

j. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana.

k. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).

l. Akuntansi Sumber Daya Manusia

Bidang akuntansi sumber daya manusia merupakan bidang akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasional yang melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan aktiva manusia.

m. Akuntansi Lembaga Nirlaba

Akuntansi lembaga nirlaba adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya, seperti yayasan, lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya. Unsur penting dari akuntansi ini adalah sistem akuntansi yang menjamin pihak manajemen akan adanya kecocokan dengan batasan-batasan dan persyaratan lainnya yang digariskan oleh Undang-Undang lain, atau oleh individu-individu yang menjadi donor.

3. Akuntansi Perpajakan

Menurut Moljono (2009:1), Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.⁶ Fungsi akuntansi pajak adalah untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan fiskus.⁷

4. Akuntansi Menurut Islam

Al-Quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalam Al-Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam Al-Quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, mengenai pencatatan yang

⁶ Djoko, Muljono, *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: CV. ANDI, 2009), h.2

⁷ Ibi d, h.53.

dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut.

Dalam pencatatan sejarah pencatatan (akuntansi) konvensional Luca Pacioli dikenal sebagai penemu akuntansi modern. Namun demikian pada tahun 622 M terbukti sebagai beberapa sistem pencatatan perdagangan telah berkembang di Madinah, dan pada zaman pemerintahan Abbasiyah 750 M telah dikembangkan lebih sempurna diantaranya *Al Jaridah* (Jurnal Pengeluaran atau Expenditure Journal), *Jaridah al-Mal* (Jurnal Penerimaan dana untuk Baitul Mal) dan lain-lain.⁸

Menurut sejarahnya, kegiatan perdagangan sudah ada pemisahan antara pemilik dengan pedagang (manajer) seperti kisah Muhammad (sebagai pedagang, agen) dengan Khadijah (sebagai pemilik). Kemudian, keberadaan ini dapat juga dilihat dari adanya perintah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan transaksi-transaksi yang belum tuntas seperti adanya utang piutang. Sayangnya literatur belum banyak menganalisa bagaimana bentuk eksistensi akuntansi pada zaman ini (lebih kurang 570 M). Dalam literatur akuntansi, ternyata yang jadi asal mula akuntansi selalu disebut Eropa.

Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

⁸ Mhd. Syahman Sitompul, et.al., *Akuntansi Mesjid* (Medan, FEBI UINSU Press, 2015), h.26

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^٩ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٩ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^٩ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^٩ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٩ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^٩ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mrngimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurani sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika mualamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikanpada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁹

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menyewakan atau menghutangkan sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat 282, sebagai perintah apabila mereka melakukan utang-piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari

⁹ Q.S Al-Baqarah (2) : 282

Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dan berbicara soal hak manusia, yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. Revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD-nya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁰

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Kabupaten atau Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah yang terutang dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) (Masyahrul,2004:5).

¹⁰ Damas Dwi Anggara, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang : UB Press, 2017), h. 18

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah (Ahmad Yani, 2008:45).¹¹

Davey (Santoso, 2013: 393), sebagaimana dikutip Nurcholis merumuskan pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapantarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.¹²

2. Retribusi Daerah

a. Defenisi Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.¹³

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo, antara lain:¹⁴

¹¹ Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 52

¹² ST.Nur Radia, "*Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*" (Skripsi, FEB Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), h.8

¹³ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Aerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Cv. Budi Utama, 2018), h. 27

¹⁴ Annisa Hubby, "*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pada Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara Tahun 2009-2011*" (Skripsi, FE Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013), h. 27-31

- 1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari Retribusi Daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum yang yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Jenis Retribusi Daerah

Retrubusi daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi parkir ditepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah air
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan, dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria:

- 1) Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jasa retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pensanggarahan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 10) Retribusi penyebrangan di atas air
- 11) Retribusi penjualan produksi daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No.23 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.¹⁵

Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut¹⁶:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Undang-Undang No.33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:¹⁷

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Penerimaan bunga deposito

¹⁵ Dewi Chrisanty Limbong, “Pengaruh Belanja Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara” (Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2012), h. 21

¹⁶ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, “Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah” (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h .35

¹⁷ Ibid, h. 22

- d. Denda keterlambatan pelaksanaan kerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan.

C. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 UU No.16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:¹⁸

Pajak menurut Prof.Dr.Rachmat Soemitro, S.H., mengatakan:

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat:

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

¹⁸ Indra Efendi Rangkuti, et. al., *Perpajakan Indonesia : Teori dan Kasus* (Medan : Madenatera, 2018), h. 2

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak menurut Dr.N.J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.¹⁹

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische betekenis der Belastingen*, 1951, berbunyi “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak Berdasarkan Asas Gotong royong, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964: “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.²⁰

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menatapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara

¹⁹ Siti Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 1

²⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 9

bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.²¹

Adapun hukum pajak menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Boleh

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya alKharaj
- b. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah
- c. Marghinani dalam kitabnya alHidayah
- d. M. Umer Chapra, dalam Islam and The Economic Challenge
- e. Abdul Qadim, dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah
- f. Sayyid Rasyid Ridha

2. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Itu Haram

Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain: Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”.

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28

Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. (Chapra, 2000).²²

3. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Defenisi Pajak

Dari defenisi-defenisi pajak dapat disimpulkan bahwa pajak:

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-undang pajak dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak maka para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa imbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai onvestasi publik.²³

4. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi *budgeter* (fungsi *financial*) dan fungsi *regulered* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi Budgeter atau Fungsi *Financial*

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Negara dan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan

²² Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 2, 2017, h. 166-177

²³ Indra Efendi Rangkuti, et. al., *Perpajakan Indonesia : Teori dan Kasus* (Medan : Madenatera, 2018), h. 2

pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya di nikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua:

1. Berdasarkan sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

2. Berdasarkan wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

c. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara yang berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

5. Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan instansi pemungut.

1. Menurut Golongan

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua: pajak langsung dan tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (kohir) memuat beberapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).²⁴

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

2. Menurut Sifat

Ditinjau dari sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua: pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif (yang bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang pungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh pajak penghasilan dan kekayaan.²⁵

b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak Objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

²⁴ Indra Efendi Rangkuti, et. al., *Perpajakan Indonesia : Teori dan Kasus* (Medan : Madenatera, 2018), h. 6

²⁵ Ibid, h. 7

pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Casavera (2008:19), lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:²⁶

1. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

a. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5. Bea Materai

6. Bea Lelang

b. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai

1. Bea Masuk

2. Cukai Tembakau

3. Cukai Alkohol

2. Pajak Daerah

²⁶ Lutfi Riyana Waqidah, “ *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun*” (Skripsi, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 12-14

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil dari penerimaan pajak-pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak-pajak Tingkat Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak-pajak Tingkat Kabupten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

c. Macam-macam Retribusi

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan tertentu.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan rata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang yang di sahkan oleh lembaga legislatif.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuhan perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan paja haruslah seminimal mungkin dann hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁷

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stetsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.²⁸

a. Stetsel Pajak

1. Stetsel Nyata (*real stetsel*). Dalam stetsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak.
2. Stetsel Anggapan (*fictive stetsel*). Dalam stetsel ini besarnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stetsel Campuran. Stetsel ini dapat dikatakan sebagai stetsel yang lebih ideal daripada stetsel nyata yang stetsel anggapan. Stetsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari stetsel nyata dan stetsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.
2. Asas Sumber. Negara yang asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Asas Kebangsaan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

²⁷ Suparmono, *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan* (Yogyakarta : CV.ANDI, 2010), h. 4

²⁸ Indra Efendi Rangkuti., dkk, *Perpajakan Indonesia:Teori dan Kasus* (Medan : Madenatera, 2018), h. 7-9

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.²⁹ Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

²⁹ Indra Efendi Rangkuti, et. al., *Perpajakan Indonesia:Teori dan Kasus* (Medan:Madenatera, 2018), h. 9

D. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pemrintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey,1988).³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai³¹:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah .

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pungutannya diselenggarakan oleh daerah di wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Boediono dalam Lutfi (2006:23), pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak

³⁰ Damas Dwi Anggara, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang : UB Press, 2017), h. 45

³¹ Ibid, h. 45

negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut Pajak Daerah.³²

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.³³

Pajak Daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU bagi Kabupten/Kota adalah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

³² Ibid, h. 47

³³ Lutfi Riyana Waqidah, “ *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun*” (Skripsi, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 14-15

2. Objek dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah penjelasan tentang objek dan tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Sedangkan dasar pengenaan PKB dihitung sebagai dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. sedangkan tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 0,075%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajak adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air. Dan tarif bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10%.

4. Pajak Air Permukaan

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dan tarif PAP ditetapkan sebesar 10%.

³⁴ Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

3. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah

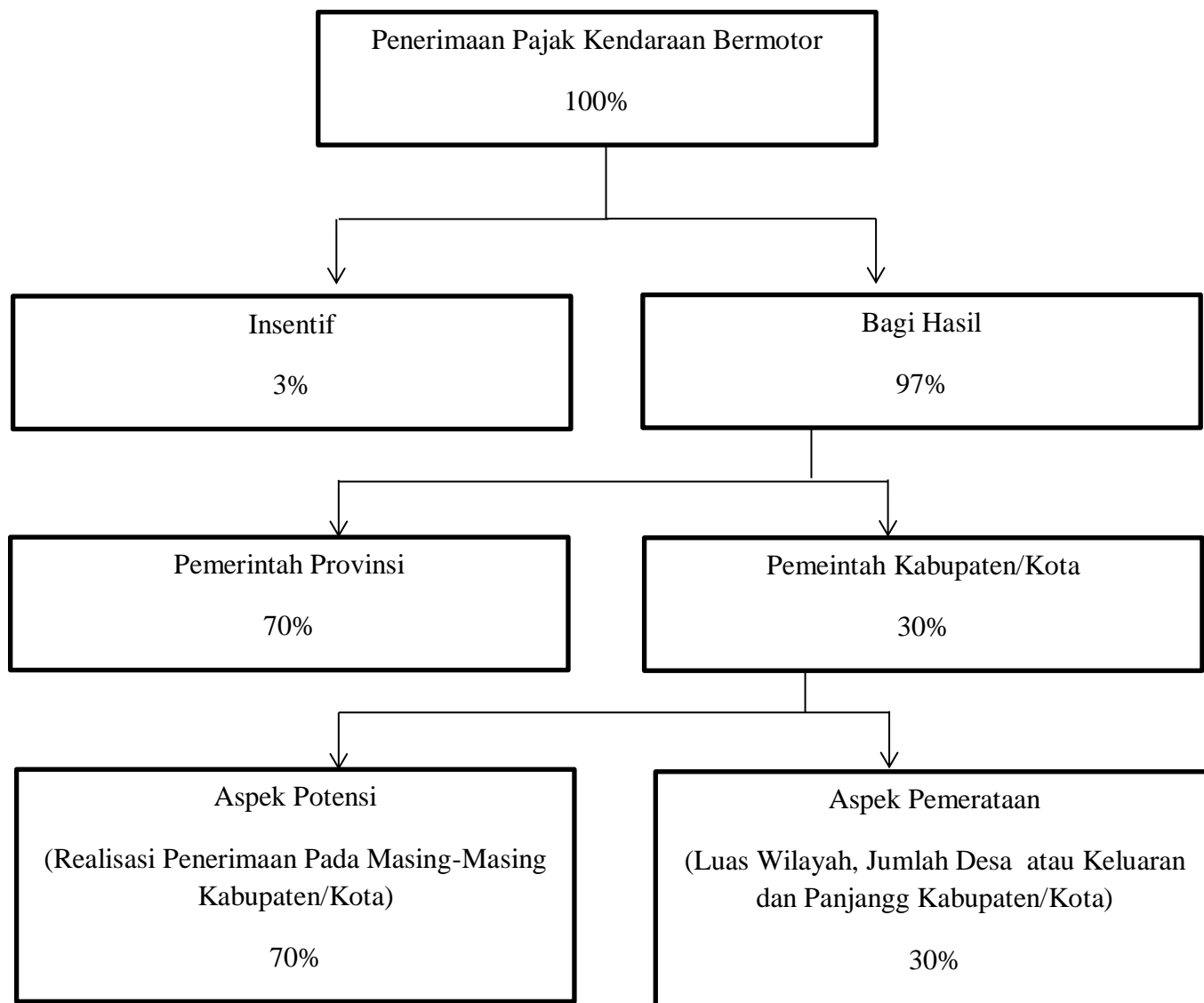
Menurut Siahaan (2008: 107) pembagian hasil penerimaan pajak provinsi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 1 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.³⁵

- a. Hasil penerimaan PKB & KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.
- b. Hasil penerimaan BBNKB & KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.
- c. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.
- d. Hasil penerimaan PPPABATP diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.

Objek pajak kabupaten/kota dalam satu provinsi bersifat lintas daerah kabupaten/kota, gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota yang terkait. Objek pajak yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa daerah kabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

³⁵ Ibid, h. 20

Skema Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor



Pembagian hasil penerimaan pajak kabupaten, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 3 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten, baik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maupun yang ditetapkan sendiri dengan peraturan daerah, diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2008: 65), adapun peraturan daerah tentang pajak daerah, yaitu:³⁶

- a. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.
- c. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - 1) Nama, objek dan subjek pajak;
 - 2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
 - 3) Wilayah pemungutan;
 - 4) Masa pajak;
 - 5) Penetapan;
 - 6) Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - 7) Daluwarsa;
 - 8) Sanksi Administrasi; dan
 - 9) Tanggal mulai berlakunya.
- d. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
- e. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- f. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

Peraturan Daerah Sumatera Utara tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan daerah No.1 Tahun 2011.

³⁶ Ibid, h. 21

E. Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Tungka & Sabijono, 2015).³⁷

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 20 permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.³⁸

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk

³⁷ Nurul Karlina dan Novi Buiarso, “Anallisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo” dalam Jurnal Emba Vol.4 No. 1, 2016, h. 717

³⁸ Ayu Triani Utami, “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”, (Skripsi, IESP Universitas Diponegoro Semarang, 2014), h. 43

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam³⁹:

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor provinsi Sumatera Utara diatur dalam:

1. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Peraturan Gubernur No.11 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

³⁹ Ibid, h. 44

digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perlatan teknik berupa motor atau peralatan teknik lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi terttentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bemotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 (7 Gross Tonnage).

Bukan objek pajak pada apajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, kecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.⁴⁰

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.⁴¹

⁴⁰ M.Tungka, H. Sabijono, “ Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara “ dalam Jurnal EMBA Vol. 3 No. 2, 2015, h. 928-937.

Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Jenis Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴²:

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang;
- e. Kendaraan khusus.

Golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan Tol berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2003, Tanggal 10 Juni 2003:

- a. Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang.
- b. Golongan I Umum : Bus Kecil dan Bus Sedang.
- c. Golongan IIA: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.
- d. Golongan IIA Umum : Bus Besar dengan 2 (dua) gandar.
- e. Golongan IIB: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

Kendaraan bermotor kategori L yaitu kendaraan beroda kurang dari empat:

- a. Kategori L1 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

⁴²ST.Nur Radia, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan" (Skripsi, FEB Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), h. 25

- b. Kategori L2 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- c. Kategori L3 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- d. Kategori L4 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya (sepeda motor dengan kereta).
- e. Kategori L5 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya

Kendaraan bermotor kategori M yaitu kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.

- a. Kategori M1 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- b. Kategori M2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton.
- c. Kategori M3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton).

Kategori M2 dan M3 dibagi atas:

- 1) Kelas I yaitu kendaraan bermotor yang dikonstruksi untuk penumpang berdiri dan bergerak bebas.
- 2) Kelas II yaitu kendaraan bermotor yang pada prinsipnya dikonstruksi membawa penumpang duduk dan di desain untuk membawa penumpang berdiri di gang dan

atau di daerah yang sudah disediakan tetapi luasnya tidak boleh lebih dari dua baris tempat duduk untuk dua orang.

- 3) Kelas III yaitu kendaraan bermotor yang di desain khusus untuk membawa penumpang duduk.
- 4) Kelas A yaitu kendaraan bermotor di desain untuk membawa penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini memiliki tempat duduk dan memungkinkan penumpang berdiri.
- 5) Kelas B yaitu kendaraan bermotor tidak di desain untuk membawa penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini tidak diijinkan adanya penumpang berdiri.

Kendaraan bermotor kategori N yaitu kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.

- a. Kategori N1 yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton.
- b. Kategori N2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton.
- c. Kategori N3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.

Kendaraan bermotor kategori O yaitu kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

- a. Kategori O1 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- b. Kategori O2 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak lebih dari 3,5 ton.
- c. Kategori O3 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton.
- d. Kategori O4 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton.

Kendaraan bermotor penarik untuk kategori 02, 03 dan dibedakan menjadi tiga tipe sebagai berikut:

- 1) Tempelan (semi trailer) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik dengan sumbu roda (dapat lebih dari satu) terletak dibelakang pusat gravitasi kendaraan (terbebani merata) dan dilengkapi dengan alat penghubung yang meneruskan tenaga horisontal dan vertikal yari dibebankan ke kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu roda digerakkan oleh kendaraan penarik.
- 2) Gandengan (*full trailer*) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik yang mempunyai sedikitnya dua sumbu roda dan dilengkapi dengan alat penarik yang dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan mengontrol arah sumbu roda depan gandengan tetapi tidak membebani kendaraan penarik.
- 3) Gandengan sumbu tengah (*Centre-axle trailer*) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik yang dilengkapi dengan alat penarik yang tidak dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan sumbu roda (dapat lebih dari satu) terletak dekat dengan pusat gravitasi kendaraan (terbebani merata), beban vertikal statis kecil, tidak lebih dari 10% berat maksimum kereta gandengan, atau beban tidak lebih dari 10.000 N dibebankan pada kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu roda digerakkan oleh kendaraan penarik.

Kendaraan bermotor kategori khusus yaitu kendaraan bermotor khusus dari pengembangan atau modifikasi kategori kendaraan bermotor kategori M, N atau O untuk angkutan penumpang atau barang dan diperlukan pembuatan bodi khusus dan / atau perlengkapannya untuk menunjang fungsi khusus tersebut.

- a. Kendaraan bermotor karavan yaitu kendaraan bermotor khusus kategori M1 dengan ruangan akomodasi yang sekurang-kurangnya terdapat perlengkapan-meja dan kursi, tempat tidur, yang terbentuk dari susunan kursi, peralatan memasak, fasilitas penyimpanan.
- b. Perlengkapan ini seharusnya terpasang tetap pada kompartemen tinggal, walaupun demikian mejanya dapat dilipat atau dipindahkan.
- c. Kendaraan lapis baja yaitu kendaraan bermotor untuk perlindungan, untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dan dilengkapi dengan pelat lapis baja anti peluru.

- d. Ambulan yaitu kendaraan bermotor kategori M yang digunakan untuk mengangkut orang sakit atau kecelakaan dan mempunyai perlengkapan khusus untuk tujuan tersebut.
- e. Kendaraan jenazah yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang meninggal dan mempunyai perlengkapan khusus untuk tujuan tersebut.

Kendaraan bermotor kategori T yaitu kendaraan bermotor baik beroda maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit dua sumbu roda, yang mempunyai fungsi pokok sebagai tenaga penarik, yaitu untuk menarik, menekan atau menggerakkan peralatan khusus, mesin atau gandengan untuk keperluan pertanian atau kehutanan.

Kendaraan bermotor kategori G yaitu kendaraan bermotor *off road* merupakan pengembangan atau modifikasi kendaraan yang termasuk dalam kategori M dan N yang memenuhi persyaratan tertentu.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka penggolongan/pengklasifikasian/pengketagorian jenis kendaraan bermotor di Indonesia dikeluarkan oleh 3 instansi terkait yang semuanya berbeda-beda yaitu Kepolisian (Samsat), Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Perhubungan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Sumatera Utara jenis-jenis kendaraan bermotor terbagi atas:⁴³

- a. Sepeda Motor
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil Bus
- d. Mobil Barang
- e. Alat-alat Berat
- f. Alat-alat Besar

7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan pada pasal 8 yaitu:⁴⁴

⁴³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011, Pasal 1

- a. 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
- b. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/ Polri dan Pemerintah Daerah.
- d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9:

- a. kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif.
- b. kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama besarnya arif pajak progresif sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kedua 2%
 - 2) Kepemilikan ketiga 2,5%
 - 3) Kepemilikan keempat 3%
 - 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%⁴⁵

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011, Pasal 8

⁴⁵ Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 9

F. Kajian Terdahulu

No	Naama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Lutfi Riayana Waqiah (2017)	Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKB di Kabuapten Madiun selalu mengalami peningkatan 2. Penerimaan layanan Drive Thru terhadap PAD mengalami perubahan trend. 3. Setelah layanan Drive Thru dari tahun ke tahun masih berfluktuasi jumlah besarnya pendapatan denda PKB. 4. PKB sebagai salah satu sumber PAD 	Penelitian ini terfokuskan pada penerimaan PKB dari layanan Drive Thru dan kontribusinya terhadap PAD.	Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.

			selama periode 2008 (dimulai layanan Drive Thru) sampai dengan 2016 selalu mengalami perubahan naik turun.		
2.	ST. Nur Radia (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.	<p>1. Realisasi PKB berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 tergolong sangat efektif.</p> <p>2. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 berada dalam kategori sangat baik.</p>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung besarnya persentase efektivitas dan kontribusi dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.
3	Putra Prasetya (2018)	Efektivitas Pemungutan Pajak	1. Realisasi PKB berdasarkan targetnya di	Penelitian ini menjelaskan efektivitas	Sama-sama menggunakan pendekatan

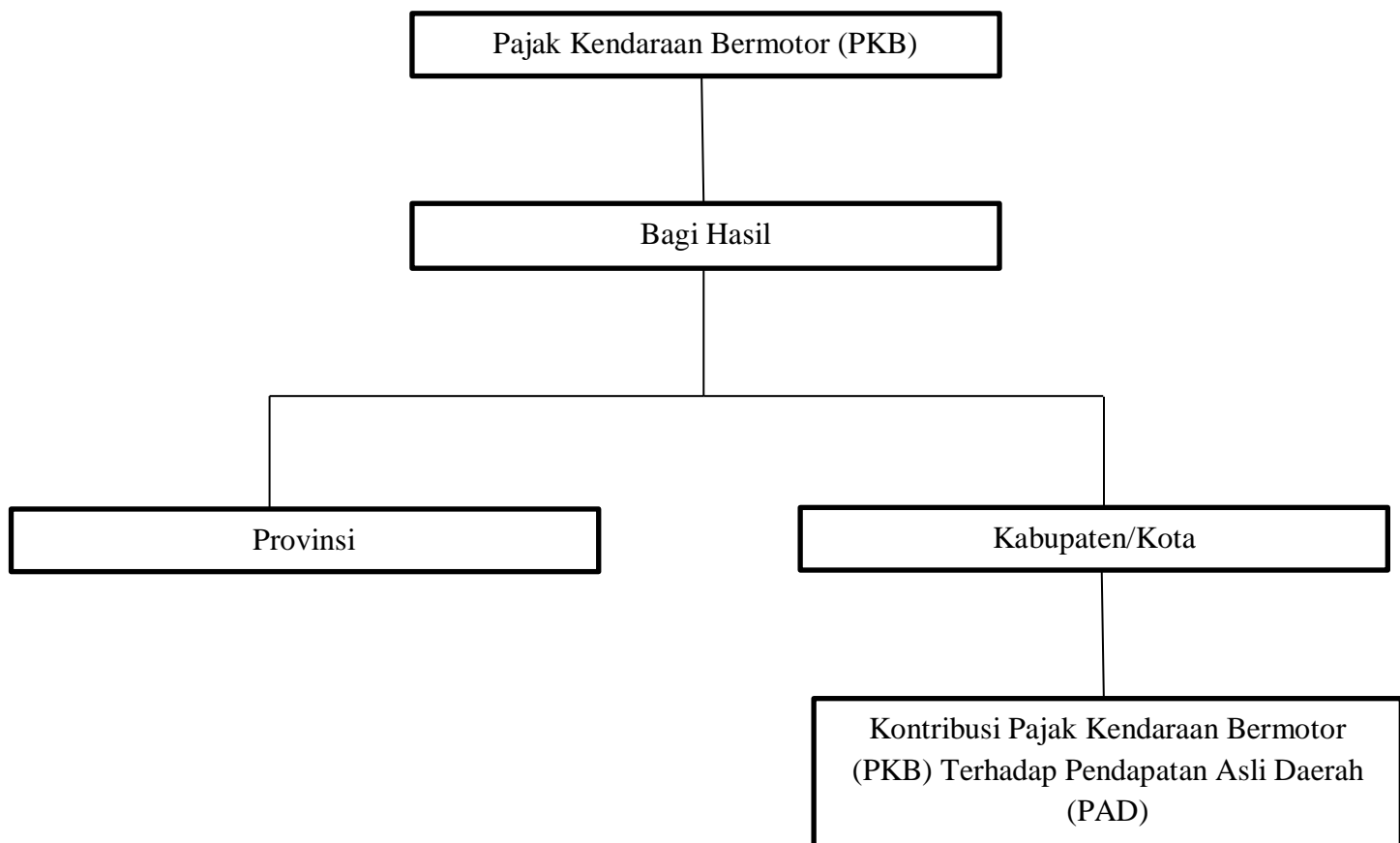
		Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan.	Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 tergolong sangat efektif. 2. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang.	penerimaan PKB yaitu untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan PKB yang diterima.	penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.
4	Muchtar, M.Faisal, Dwi Susilawati (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara.	1. Rata-rata kontribusi PKB di Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun terakhir sebesar 7,96%. 2. PKB jenis Scooter mampu memberikan kontribusi terbanyak bagi PKB	Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif.	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

			Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012-2016 dengan rata-rata kontribusi sebesar 96,86%.		
5.	Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)	<p>1. Jumlah penerimaan PKB selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga memperngaruhi jumlah penerimaan PAD yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>2. Jumlah rata-rata PAD selama tahun 2011-2014</p>	Penelitian ini terfokuskan pada penerimaan PKB untuk Provinsi dimana akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD karena PKB merupakan Pajak Provinsi.	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

			sebesar 43.998.155.50 0 dan jumlah rata-rata penerimaan PKB sebesar 17.279.891.50 0 dengan persentase rata-rata 39,05%.		
--	--	--	---	--	--

G. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.⁴⁶

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan ruang lingkup penelitian pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar.

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang memperoleh gambaran tentang bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana peneliti melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada dan mengungkapkan fakta dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar.

⁴⁶ Nur Ahmadi Bi rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan : FEBI UINSU - Press, 2016), h. 4

Alasan pemilihan lokasi penulisan di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, karena letaknya yang dekat dengan domisili peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2020.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Judul Proposal						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pelaksanaan Penelitian						
Pengolahan Data, Analisis, dan Penyusunan Laporan						
Seminar Hasil atau Sidang						

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu dimana objek penelitian tersebut melekat atau menjadi sumber objek penelitian.⁴⁷

Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor, dana bagi hasil dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar. Maka peneliti tidak terlepas dari pihak-pihak yang akan menjadi subjek dalam penelitian. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kepala Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar.
2. Staf Kebendaharaan Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar.

⁴⁷ Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PRENADEMEDIA GROUP, 2019), h. 17

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan menjadi bahan perhatian penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kontribusi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari SAMSAT Kota Pematangsiantar.

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang atau catatan, seperti buku, laporan buletin, dan masalah yang sifatnya dokumentasi.⁴⁹

Jenis Data yang digunakan dalam bentuk:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar
2. Data Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pematangsiantar
3. Data jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pematangsiantar
4. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

⁴⁸ Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PRENADEMEDIA GROUP, 2019), h. 17

⁴⁹ Bagya Waluya, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian di Kantor SAMSAT Kota Pematangsiantar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵⁰ Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu, kepala Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar dan Staff kebendaharaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

b. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi.⁵¹

F. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan valid dan ilmiah.⁵²

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.⁵³

⁵⁰ Nur Ahmadi Bi rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan : FEBI UINSU - Press, 2016), h. 52

⁵¹ Ibid, h. 56

⁵² Ibid, h. 77

⁵³ Muh.Fitrah, *Metodologi Penelitian ; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), h. 36

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data dan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jenis dan jumlah kendaraan bermotor, denda Pajak Kendaraan Bermotor, bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dan Penerimaan PAD.
2. Menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, jenis dan jumlah kendaraan bermotor, denda Pajak Kendaraan Bermotor, Menganalisis bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

Pada mulanya urusan pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri dalam Negeri R.I. tanggal 7 November 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia”, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula Pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 14/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Instansi teknis, yang membentuk Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantu (medebewind). Salah satu dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuk UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas). UPTD ini terdapat organisasi Sistem Administrasi Bersama di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Pada tanggal 1 april 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT, yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. SAMSAT merupakan singkatan dari “ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” adalah gabungan dari Tiga Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai Objek data yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara.

Instansi yang terkait dalam Kantor SAMSAT yaitu :

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
3. Departemen Keuangan yaitu PT.(Persero) Jasa Raharja Utama Pematangsiantar

Berdirinya kantor bersama SAMSAT merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (Menhankam, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) yang membentuk kerjasama dengan system baru yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sector BBN-KB.
3. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Pematangsiantar.
4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran dan pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

Untuk mengoptimalkan sumber pemasukan dan sumber dana terhadap Pendapatan Daerah untuk keperluan pembiayaan pemerintah Daerah maka Dinas Pendapatan

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas tersebut adalah Dekonsentrasi di bidang Pendapatan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, mempunyai tugas sebagai berikut :

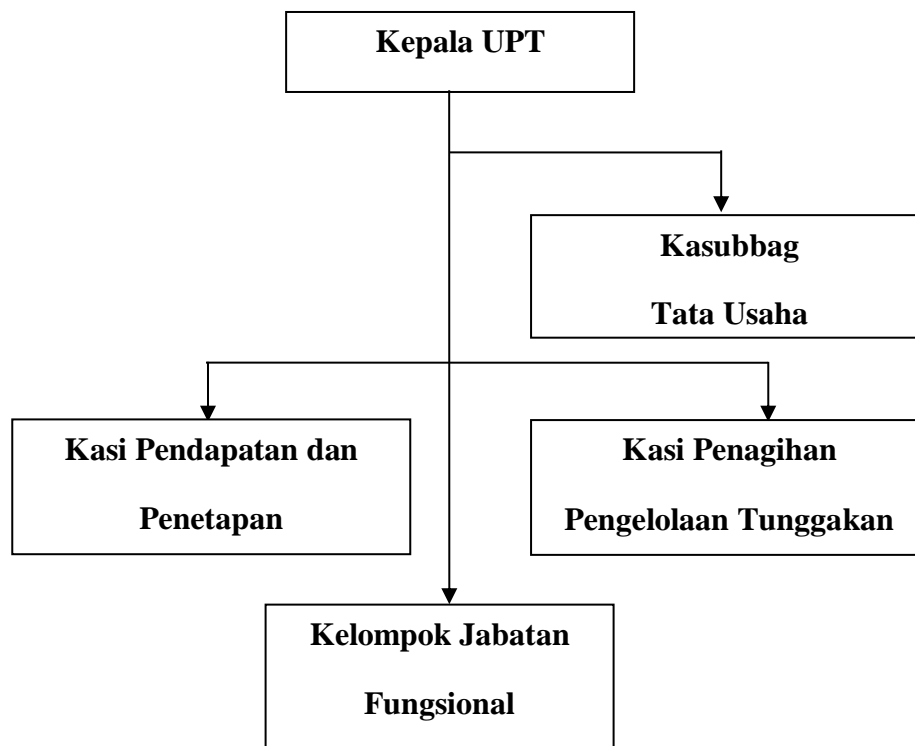
1. Memimpin dan mengkoordinir segala usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak retribusi atau pungutan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah maupun pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang guna menciptakan atau mencari sistem baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah ke dalam kas daerah secara maksimal baik terhadap sumber pendapatan yang ada maupun dengan penggalan sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pembinaan, program, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan lain- lain, pengendalian dan pembinaan.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan Ketetapan Kepala Daerah.

2. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PEMATANGSIANTAR



3. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pemungutan dan penagihan atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan Umum
4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor
5. Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6. Denda Pajak Air Permukaan Umum

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar berdasarkan keputusan Kepala UPT BPPRD Prov. Sumatera Utara Pematangsiantar Nomor 800/485/UPT/PS/2017 adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT SAMSAT.
- b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT.
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi pajak dan retribusi daerah.
- d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja Terkait.
- g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT SAMSAT dan Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT SAMSAT.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan.
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan pengarsipan.
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT SAMSAT Dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kasi Pendataan dan Pendapatan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok.
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok.
- d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok.
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta penetapan PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok.
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait.
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok.
- c. Melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok.
- d. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok.
- e. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait.
- g. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Gambaran Umum Pegawai

NO.	GOLONGAN / RUANG	PEREMPUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	KETERANGAN
1	IV/A	1	2	3	1 Ka.UPT, 1 Kasi, 1 Staf
2	IV/B				
3	IV/C				
4	IV/D				
5	IV/E				
JUMLAH		1	2	3	
6	III/A	2	2	4	4 Staf
7	III/B	5	6	11	11 Staf
8	III/C	2	4	6	1 KTU, 5 Staf
9	III/D	7	4	11	1 Kasi 10 Staf
JUMLAH		16	16	32	
10	II/A				7 Staf 1 Staf
11	II/B				
12	II/C	3	4	7	
13	II/D		1	1	
JUMLAH		3	5	8	
14	I/A				
15	I/B				
16	I/C				
17	I/D				
JUMLAH		0			
JUMLAH		20	23	43	

KESELURUHAN				
-------------	--	--	--	--

JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN	PENDIDIKAN
43 Orang	IV = 3 Orang III = 32 Orang II = 8 Orang	S2 = 5 Orang S1 = 24 Orang D3 = 1 Orang SLTA = 13 Orang

JUMLAH	PENDIDIKAN
Tenaga Kebersihan 12 Orang	S1 4 Orang D3 1 Orang SLTA 7 Orang
Tenaga Keamanan 11 Orang	S1 2 Orang D3 2 Orang SLTA 7 Orang
Tenaga Outsourcing 10 Orang	S1 5 Orang D3 2 Orang SLTA 3 Orang

B. Deskripsi Data

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3

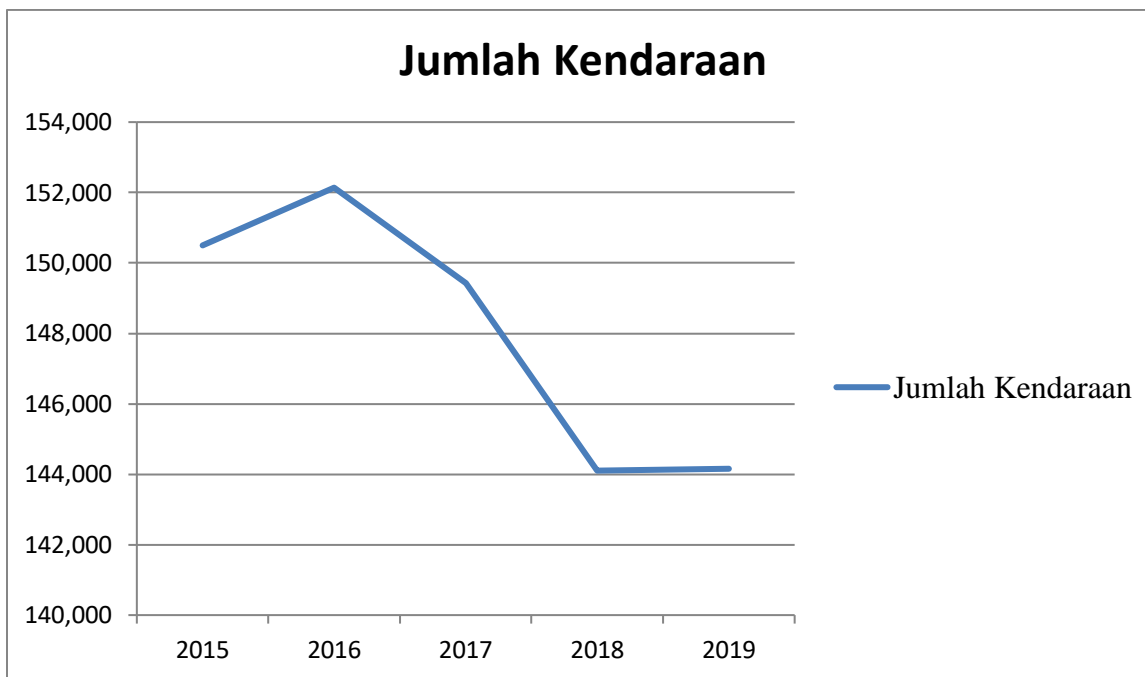
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

Tahun	Jumlah
2015	150.501
2016	152.139
2017	149.433
2018	144.103
2019	144.154

Sumber: Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.1

**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat/UPPD
PEmatangsiantar**



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar mengalami naik turun. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 1.638 kendaraan. Mengalami penurunan di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 2.696 kendaraan dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 sebesar 5.330 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan jumlah kendaraan sebesar 51 kendaraan.

2. Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus Kota Pematangsiantar

Tabel 1.4

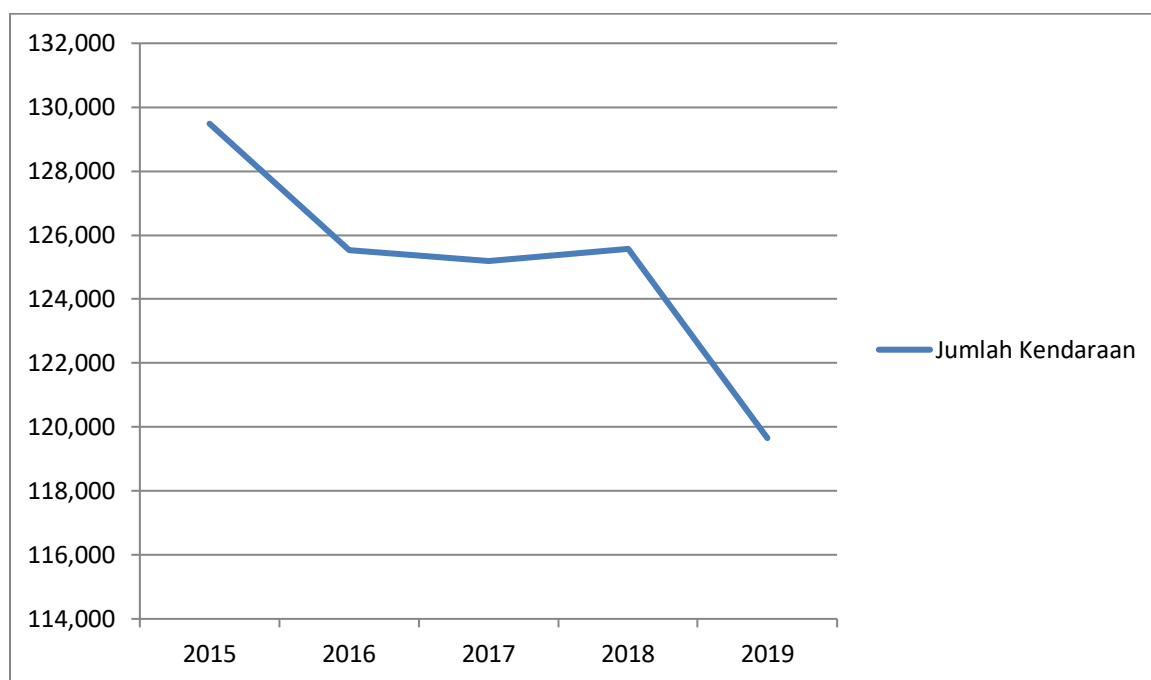
Jumlah Kendaraan Khusus Kota Pematangsiantar

Tahun	Jumlah
2015	129.486
2016	125.538
2017	125.183
2018	125.572
2019	119.651

Sumber: Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.2

Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus Kota Pematangsiantar



3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD

Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.5

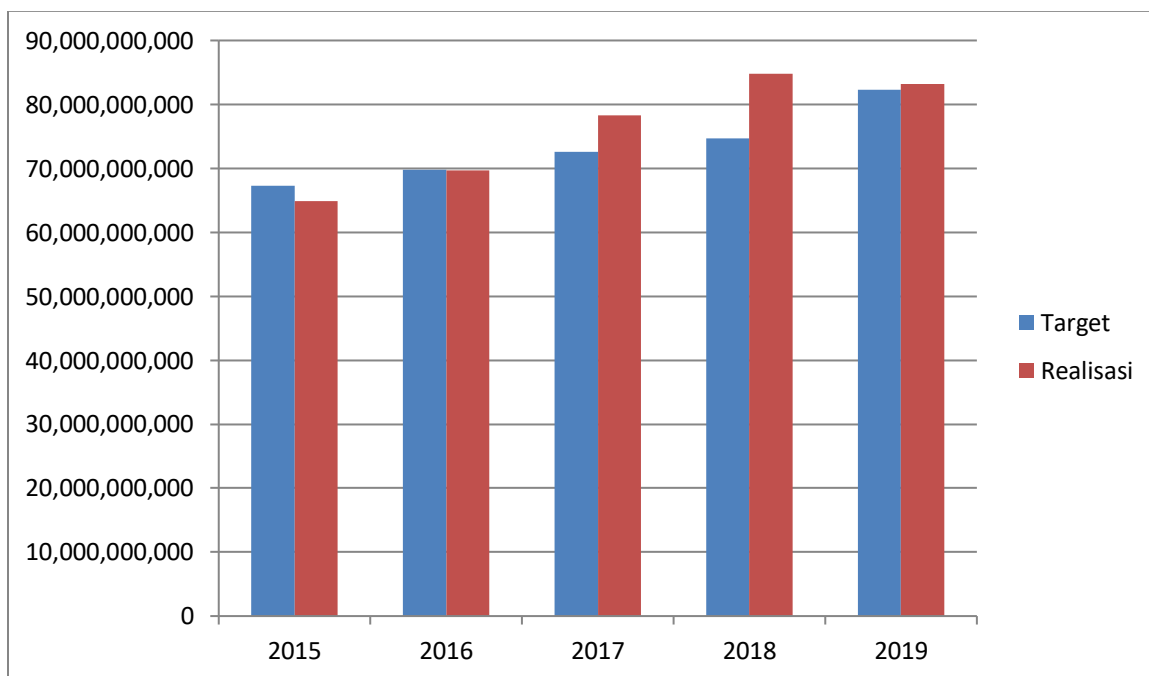
Penerimaan PKB Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	67.257.428.583	64.931.898.502	96,54
2016	69.781.386.031	69.723.604.659	99,92
2017	72.634.737.851	78.248.169.833	107,73
2018	74.661.357.873	84.763.346.802	113,53
2019	82.280.690.086	83.172.413.280	100,90

Sumber: Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.3

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar mengalami kenaikan walaupun tidak secara

signifikan, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 realisasi PKB tidak lebih besar dari target yaitu sebesar 96,54% pada tahun 2015 dan 99,92% pada tahun 2016. Dalam setiap menentukan target mengandalkan prediksi terhadap potensi, namun dalam kenyataan di lapangan realisasi penerimaan PKB tidak selalu lebih besar dari target penerimaan.

4. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

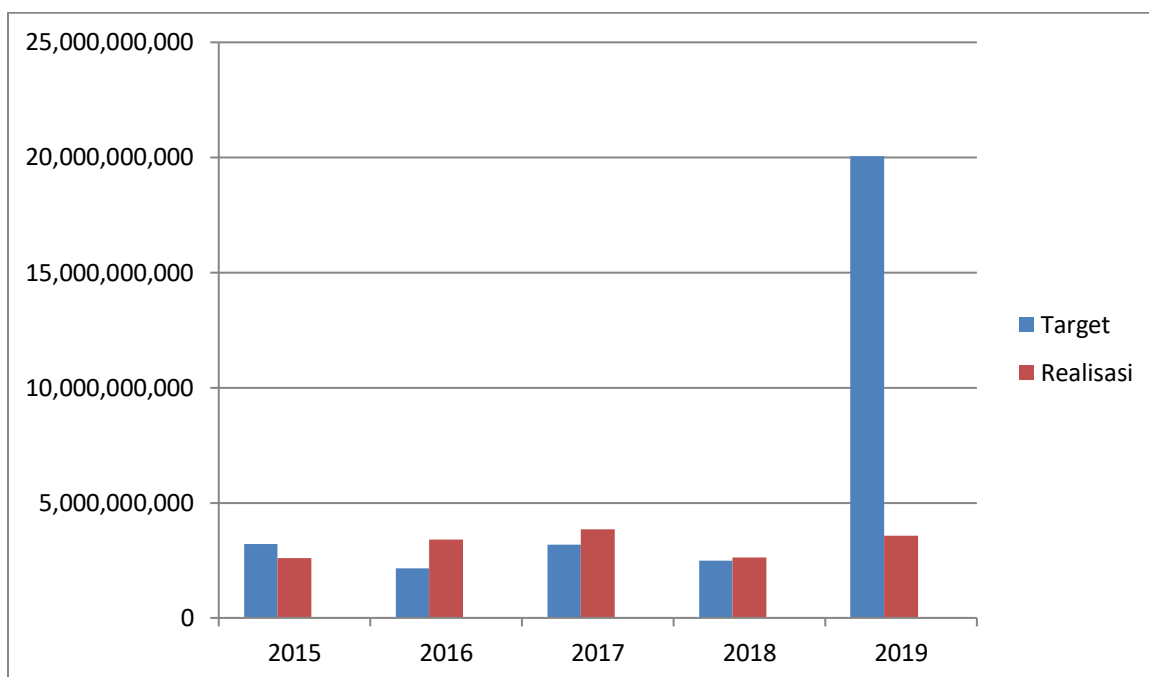
Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.6

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	3.216.814.766	2.610.842.153	67,51
2016	2.165.000.000	3.392.257.294	156,69
2017	3.192.254.782	3.860.044.505	120,92
2018	2.472.391.553	2.614.007.059	105,73
2019	20.064.461.083	3.562.188.817	17,75

Sumber: Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.4**Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

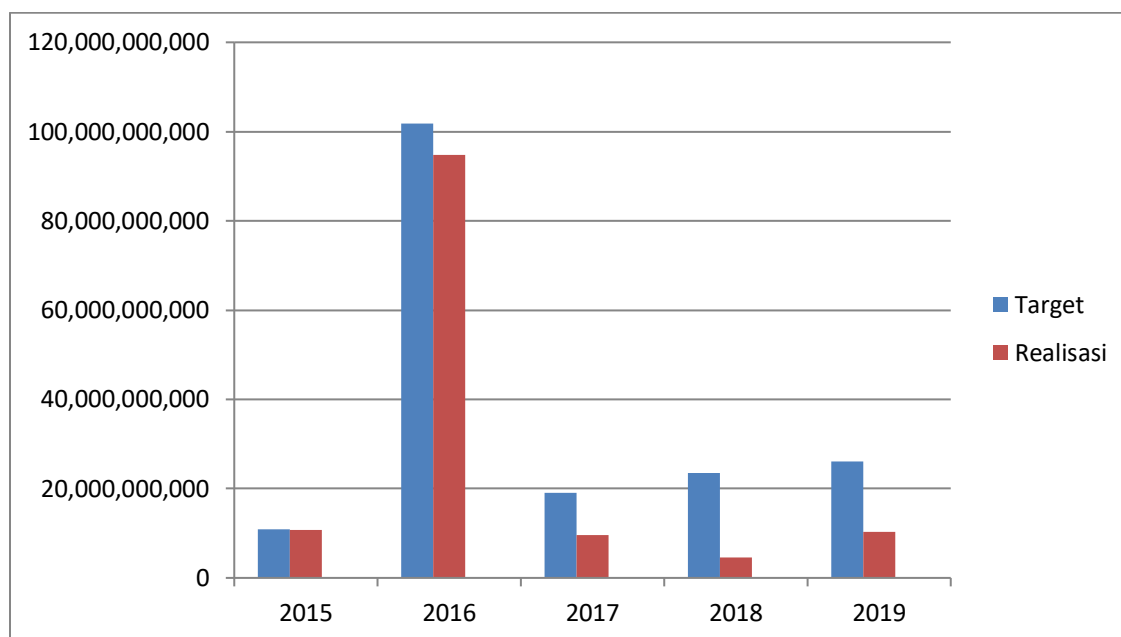
Berdasarkan tabel di atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan walaupun pada tahun 2015 dan 2019 pendapatan denda pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target.

5. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pematangsiantar Setelah Bagi Hasil

Tabel 1.7**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Bagi Hasil**

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	10.837.812.572	10.737.812.572	0,99
2016	101.760.527.083	94.732.758.604	0,93
2017	19.088.321.404	9.579.302.211	0,50
2018	23.440.918.256	4.534.061.433	0,19
2019	26.045.918.256	10.262.473.817	0,39

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.5**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pematangsiantar Setelah Bagi Hasil**

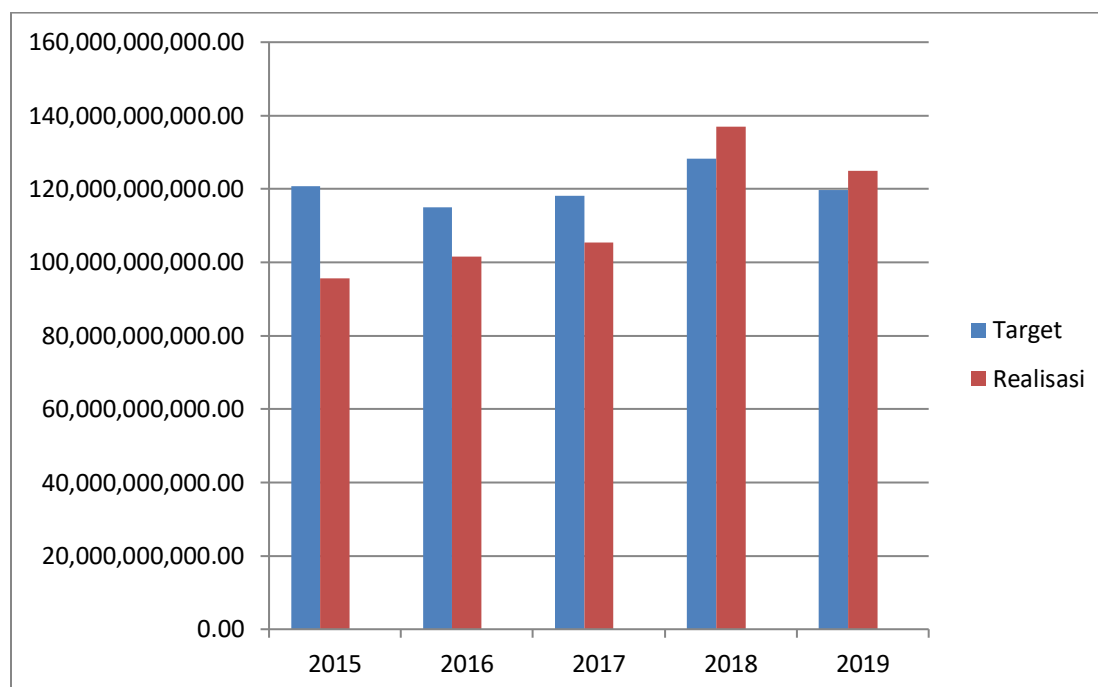
Berdasarkan grafik di atas penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya tidak mencapai target. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling rendah terdapat pada tahun 2018 yang hanya mencapai 0,19% dari target.

6. Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar**Tabel 1.8****Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	120.786.489.041,40	95.557.865.286,26	0,79
2016	115.039.165.174,10	101.528.731.954,78	0,88
2017	118.148.890.828,40	105.445.993.204,23	0,98
2018	128.188.366.612,00	137.052.839.192,78	1,07
2019	119.678.393.103,98	125.018.502.647,54	1,04

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar, 2020

Grafik 1.6
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar



Dari Grafik di atas Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar pada tahun 2015 merupakan pendapatan terendah dengan persentase 0,79% dari target. Dan dapat mencapai target pada tahun 2018 sebesar 1,07% dan 1,04% pada tahun 2019.

7. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar

Tabel 1.9
Kontribusi PKB Terhadap PAD

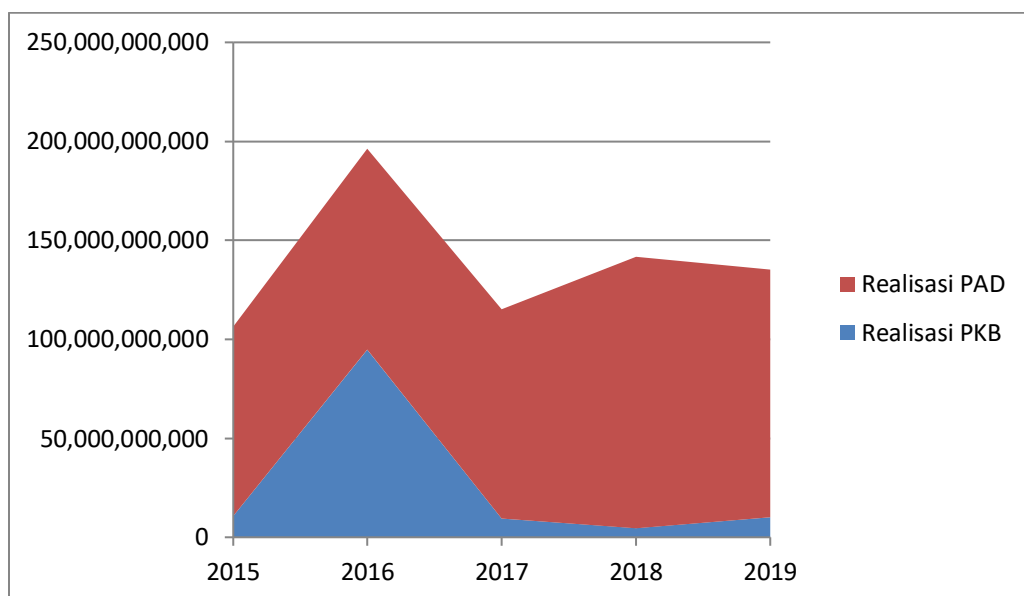
Tahun	Realisai PKB	Realisasi PAD	Kontribusi PKB Terhadap PAD
2015	10.737.812.572	95.557.865.286,26	11,24%
2016	94.732.758.604	101.528.731.954,78	93,31%
2017	9.579.302.211	105.445.993.204,23	9,08%
2018	4.534.061.433	137.052.839.192,78	3,31%

2019	10.262.473.817	125.018.502.647,54	8,21%
------	----------------	--------------------	-------

Sumber: Data Diolah

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dimana hanya Pemerintah Provinsi yang dapat melakukan perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Grafik 1.7
Kontribusi PKB Terhadap PAD Kota Pematangsiantar



Dari Grafik di atas kontribusi tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019 yaitu pada tahun 2016 yang mencapai 93,31% dan yang terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 3,31%.

C. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Daerah Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala UPPD Samsat Pematangsiantar dijelaskan bahwa sejak tahun 2018 seluruh Kota/Kabupaten di Sumatera Utara dapat membayarkan pajak kendaraannya di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar. Hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor

secara online yang sifatnya hanya untuk pembayaran pajaknya saja. Tetapi untuk Bea Balik Nama Kendaraan kembali ke Samsat asal.⁵⁴

2. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan jumlah kendaraan seluruh masyarakat yang berdomisili di Sumatera Utara yang membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar.⁵⁵

Dari hasil penelitian dan wawancara bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar maupun jumlah kendaraan khusus Kota Pematangsiantar mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Menurut kepala UPPD Samsat Pematangsiantar penurunan jumlah kendaraan bermotor yang semakin berkurang dapat disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dikarenakan ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat yang menyebabkan kerusakan atau hancur pada kendaraan bermotor, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang hilang setiap tahunnya.⁵⁶

Adapun jenis-jenis kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar yaitu:

- a. Sedan
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Kuning
 - 3) Plat Merah
- b. Jeep
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Kuning

⁵⁴ Abdul Shomad, S.E, Kepala UPT Samsat Pematangsiantar, Wawancara di Pematangsiantar pada tanggal 16 Juni 2020

⁵⁵ Samaria Renata Isabella Sihite, S.STP, M.Si, Sub Bagian Tata Usaha, wawancara di Pematangsiantar pada tanggal 29 Juni 2020

⁵⁶ Abdul Shomad, S.E, Kepala UPT Samsat Pematangsiantar, Wawancara di Pematangsiantar pada tanggal 16 Juni 2020

- 3) Plat Merah
- c. Bus, Micro Bus
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Kuning
 - 3) Plat Merah
- d. Mini Bus
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Kuning
 - 3) Plat Merah
- e. Truk/Pick Up
 - 1) Plat Hitam\
 - 2) Plat Kuning
 - 3) Plat Merah
- f. Betor / R.3
- g. Sepeda Motor
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Merah
- h. Kendaraan Alat-Alat Berat
 - 1) Plat Hitam
 - 2) Plat Merah

3. Program-Program Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar juga memiliki sarana dan prasarana untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan berbagai program diantaranya:

- a. Saminten

Saminten adalah singkatan dari Sabtu Minggu Paten yang merupakan salah satu program kerja tim pembina Samsat Provinsi Sumut dan tim Samsat Kota Pematangsiantar yang beroperasi sejak tahun 2017. Saminten beroperasi pada hari sabtu dan minggu untuk mempermudah masyarakat yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan untuk membayar PKB dan SWDKLLJ, serta

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengesahan STNK tahunan, dengan menggunakan bus Samsat Keliling yang dioperasikan di tempat-tempat strategis.

b. Samsat Keliling

Samsat Keliling merupakan salah satu program di Samsat Pematangsiantar dimana Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan sedangkan untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 tahunan dan ganti plat nomor harus ke Samsat induk. Tujuan Samsat Keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran PKB dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari Samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

c. Samsat Online

Program Samsat Online Nasional dibuat atas Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap. Menurut Kepala UPPD Samsat Pematangsiantar, minat masyarakat terhadap Samsat Online masih minim.

Dari program-program di atas, yang menjadi program unggulan Samsat Pematangsiantar yaitu program Saminten (Sabtu Minggu Paten). Hal ini dikarenakan program tersebut sangat membantu masyarakat yang tidak dapat membayarkana pajak kendaraan bermotornya di hari kerja. Dengan adanya program tersebut penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan di tahun 2017.

4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan karena pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dari 113,53% pada tahun 2018 menjadi 100,90% pada tahun 2019. Walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Sejak diberlakukannya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dimana seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar mengalami kenaikan.
- b. Adanya program unggulan Samsat Pematangsiantar yaitu Saminten yang sangat mempermudah masyarakat untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotornya di hari weekend. Program ini memberikan sumbangsih yang cukup besar dimana dari program ini terdapat pendapatan denda pajak yang cukup meningkat.

Berdasarkan data Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang semakin berkurang sedangkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya semakin bertambah. Menurut Kepala UPPD Samsat Pematangsiantar hal ini dapat disebabkan oleh wajib pajak yang dikenakan tarif lebih tinggi yang membayarkan pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak dengan tarif rendah. Sebagai contoh lebih banyak wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 4 yang membayarkan pajaknya dibandingkan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2. Seperti yang kita ketahuai tarif pajak kendaraan roda 4 lebih besar dibandingkan kendaraan roda 2. Selain tarif pajak, pajak progresif juga berperan dalam meningkatnya jumlah penerimaan PKB di Kota Pematangsiantar.

5. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lainnya

- a. Denda Pajak

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap

sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁷

b. Pajak Progresif

Tarif pajak progresif persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.⁵⁸

Besarnya tarif progresif menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua 2%
- 2) Kepemilikan ketiga 2,5%
- 3) Kepemilikan keempat 3%
- 4) Kepemilikan jelima dan seterusnya sebesar 3,5%⁵⁹

6. Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan. Kenaikan jumlah penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor dapat disebabkan oleh adanya program unggulan samsat yang sangat membantu masyarakat mempermudah membayar pajak kendaraan bermotornya. Program tersebut yaitu Saminten (Sabtu Minggu Paten), dimana masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor di hari weekend sabtu dan minggu.⁶⁰

7. Sistem Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 1 menjelaskan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan yaitu sebesar 30%.

Sistem pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepala UPT Samsat Pematangsiantar untuk Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 70% dan untuk

⁵⁸ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA – Mekanisme dan Perhitungan* (Yogyakarta : CV. ANDI, 2010), h. 7

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 9 ayat 3

⁶⁰ Samaria Renata Isabella Sihite, S.STP, M.Si, Sub Bagian Tata Usaha, wawancara di Pematangsiantar pada tanggal 29 Juni 2020

wilayah daerah Kota/Kabupaten sebesar 30%. Dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungut oleh Samsat Pematangsiantar akan diberikan secara keseluruhan kepada Provinsi. Pemerintah Provinsi lah yang berwewenang untuk membagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah dibagi hasil pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Pematangsiantar kepada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar sebesar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.⁶¹

Kurangnya informasi mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor membuat para staff tidak mengetahui bagaimana sistem bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan wilayah-wilayah yang dapat membayarkan pajak kendaraannya di Kantor Bersama Samsat UPT DISPENDASU Pematangsiantar.

8. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah bagi hasil di Kota Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 tidak mencapai target. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam memenuhi kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya, banyaknya kendaraan masyarakat yang hilang atau rusak sehingga tidak membayarkan pajaknya lagi serta kurangnya edukasi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mengajak masyarakatnya patuh membayar pajak.

Walaupun demikian, penerimaan pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. Selain itu juga memberikan sumbangsih terhadap penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Utara sebesar 70%.

D. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019 Di Kota Pematangsiantar

⁶¹ Abdul Shomad, S.E, Kepala UPT Samsat Pematangsiantar, Wawancara di Pematangsiantar pada tanggal 16 Juni 2020

Menurut Peraturan daerah Sumatera Utara Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁶² Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipungut oleh setiap daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dimana Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pematangsiantar merupakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibagi hasil untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar bertugas untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara, bukan hanya untuk masyarakat Kota Pematangsiantar melainkan juga masyarakat di luar Kota Pematangsiantar yang masih dalam domisili Provinsi Sumatera Utara. Setelah secara keseluruhan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungut akan dibagi hasil sesuai dengan seberapa besar kontribusi setiap Kabupaten/Kota yang membayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar mengalami naik turun dan tidak mencapai target dalam lima tahun terakhir. Penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar 94.732.758.604 dan penerima terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 4.534.061.433. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pematangsiantar yang dipungut oleh Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 Di Kota Pematangsiantar

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya

⁶² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1

adalah keikutsertaan, melibatkan diri maupun sumbangan. Sedangkan kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Uang Iuran (kepada perkumpulan); sumbangan.⁶³

Menurut penulis perbedaan antara partisipasi masyarakat dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan terletak pada aktivitas masyarakat yang bersangkutan dalam proses pembangunan. Jika masyarakat aktif ikut serta bekerja dalam proses pembangunan, melainkan menyumbangkan sesuatu untuk kelancaran proses itu, maka hal tersebut disebut kontribusi. Jadi pengertian kontribusi terbatas pada memberikan bantuan tenaga, barang, atau uang tanpa ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang dicapai.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi dimana pemerintah Kota/Kabupaten hanya mendapatkan 30% sedangkan 70% diberikan untuk Pemerintah Provinsi. Walaupun demikian Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi dengan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat di tahun 2016 PKB memberikan 93,31% kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.

⁶³ Lukman Surya dan Nur Kholik, *MANIFESTO Modrenisasi Pendidikan Islam : Ulasan Pemikiran Soekarno* (Jawa Barat : Edu Pubusher, 2020), h. 10

⁶⁴ Boli Sabon Max, *Pendekatan Dogmatika Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Dan Hukum Pancasila* (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h. 255

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Pada tahun 2015-2016 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar tidak mencapai target. Sedangkan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2017-2019 mencapai target. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematangsiantar setelah dibagi hasil pada tahun 2015-2019 mengalami naik turun dan tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.
2. Berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup baik, walaupun mengalami naik turun sejak tahun 2015-2019. Kontribusi yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dimana Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten hanya menerima 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini peneliti menyarankan kepada pemerintah Kota Pematangsiantar untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi untuk mengajak masyarakat atau wajib pajak agar membayar pajak kendaraannya. Dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar. Dengan semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya maka akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka akan memberikan sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar maka akan dapat lebih memberikan kemakmuran bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.

2. Berdasarkan penelitian ini menyarankan untuk lebih transparan mengenai sistem bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kota/Kabupaten. Dengan mengetahui sistem bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibayarkan oleh masyarakat terhadap daerah tempat dimana masyarakat tersebut berdomisili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Nur Birahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : FEBI UINSU – Press. 2016

Alfaturkaniati.,dkk. *Pengantar Akuntansi I*.Medan: Madenatera. 2016.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak. 2018.

Dwi Anggara, Damas. *Pajak Daerah dan Retrsibusi Daerah*. Malang: UB Press. 2017.

Dwi Anggara, Damas. *Pajak Daerah dan Retrsibusi Daerah*. Malang: UB Press. 2017.

Efendi Rangkuti, Indra.*Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera. 2018.

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan, Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Jaya, Indra. *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PRENADEMEDIA. 2019.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.

Sitompul, Mhd. Syahman. *Akuntansi Mesjid*. Medan: Febi UINSU Press. 2015

Suendy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat. 2014.

Suparmono. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Medan: Madenatera. 2010.

Wahyu, Bagya. *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves. 2007.

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iriyanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.

Jurnal

- Karlina dan Budiarmo. (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*, Jurnal Emba. Vol. 1, 717.
- Muchtar.(2017). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.1 Jilid 1.385-399.
- Rompis.(2015). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15.1
- Surahman dan Ilahi. (2017). *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1.166-167.
- Tungka dan Sabijono. (2015). *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba Vol.3 No.2, 928-937.

Skripsi

- Devi, Uma. 2009. “*Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Serdang Bedagai*”. Tugas Akhir. FISIP. DIII Administrasi Perpajakan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hubby, Annisa. 2013. “ *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pada Kota dan Kabupaten Di Sumatera Utara*”. Skripsi. FE. Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Limbong, Dewi Christianty. 2012. “ *Pengaruh Belanja Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Modeterating Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*”. Skripsi. FE. Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Radia, ST. Nur. 2017. “ *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*”. Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Utami, Ayu Triani. 2014. “ *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktotr-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daearah Di Provinsi Jawa Tengah*”. Skripsi. FEB. ISEP, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Waqidah, Lutfi Riyana. 2017. “*Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Madiun*”. Skripsi. FE, Akuntansi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 3-42

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 8

LAMPIRAN

18/6/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MjgxNw==>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1739/EB.I/KS.02/05/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

18 Juni 2020

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Bersama Samsat UPT DISPENDASU Pematangsiantar

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Anggun Citra Dilla
NIM	: 0502162147
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumber Jaya, 12 September 1998
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL BARU KARANG SARI Kelurahan KARANG SARI Kecamatan GUNUNG MALIGAS

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Bersama Samsat UPT DISPENDASU Pematangsiantar, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat UPT DISPENDASU Pematangsiantar)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 18 Juni 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MjgxNw==>

1/2

LEMBAR WAWANCARA

1. Bagaimana ketentuan daerah yang dapat membayarkan PKB di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar?
“ Seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar”.
2. Sejak tahun berpakah ketentuan daerah yang dapat membayarkan PKB tersebut diberlakukan?
“ Sejak diberlakukan sistem pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara online, yaitu sejak tahun 2018”
3. Bagaimana penerimaan PKB sebelum ketentuan daerah yang dapat melakukan pembayaran PKB tersebut diberlakukan?
“ Sebelum diberlakukan ketentuan daerah penerimaan PKB di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar tidak mencapai target pada tahun 2015 dan 2016, dan mulai mecapai target di tahun 2017”.
4. Bagaimana pengaruh penerimaan PKB setelah ketentuan daerah yang dapat membayarkan PKB nya tersebut diberlakukan?
“ Sejak 2018 penerimaan PKB di Kantor Bersama Samsat/UPPD mengalami kenaikan yang cukup tinggi”.
5. Apakah seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan kendaraan dari seluruh Kota/Kabupaten Sumatera Utara?
“ YA, sejak tahun 2018 kendaraan yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan kendaraan dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Samsat UPPD Pemaangsiantar”.
6. Jenis kendaraan apa sajakah yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar?
“Sedan, Jeep, Bus/Micro Bus, Mini Bus, Truk/Pick Up, Betor/R.3, Sepeda Motor, dan Kendaraan Alat-Alat Berat.
7. Bagaimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar pada yahun 2015-2019?
“ Mengalami Penurunan walaupun tidak secara signifikan”.
8. Jika mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor, apakah yang mempengaruhinya?
“ Meningkatnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dan banyaknya wajib pajak di luar kota Pematangsiantar yang membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar”
9. Jika mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor, apakah yang mempengaruhinya?

“Kurangnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dikarenakan ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat yang menyebabkan kerusakan atau hancur pada kendaraan bermotor, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang hilang setiap tahunnya”.

10. Bagaimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor khusus Kota Pematangsiantar pada tahun 2015-2019?

“ jumlah kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar juga mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun tidak secara signifikan”.

11. Jika mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor khusus Kota Pematangsiantar, apa yang mempengaruhinya?

“Meningkatnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor”.

12. Jika mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor khusus Kota Pematangsiantar, apa yang mempengaruhinya?

“Kurangnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dikarenakan ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat yang menyebabkan kerusakan atau hancur pada kendaraan bermotor, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang hilang setiap tahunnya”.

13. Bagaimana perkembangan penerimaan PKB di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar pada tahun 2015-2019?

“ Setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan”

14. Apakah sebanding jumlah kendaraan bermotor dengan hasil penerimaan PKB?

“ Tidak, karena penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan pada saat jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan.”

15. Apa yang menyebabkan jumlah kendaraan bermotor sedikit tetapi penerimaan PKBnya semakin meningkat?

”Disebabkan oleh wajib pajak yang dikenakan tarif lebih tinggi yang membayarkan pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak dengan tarif rendah. Sebagai contoh lebih banyak wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 4 yang membayarkan pajaknya dibandingkan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2. Seperti yang kita ketahui tarif pajak kendaraan roda 4 lebih besar dibandingkan kendaraan roda 2. Selain tarif pajak, pajak progresif juga berperan dalam meningkatnya jumlah penerimaan PKB di Kota Pematangsiantar”.

16. Apa sajakah sumber-sumber penerimaan PKB?

“ Denda Pajak, Pajak Progresif”.

17. Apa sajakah program-program yang terdapat di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar?

“ Saminten, Samsat Keliling, Samsat Online”.

18. Program apakah yang menjadi program unggulan Samsat Pematangsiantar?

“ Program Saminten”

19. Sejak tahun berapakah program unggulan tersebut diberlakukan?

“ Tahun 2018”.

20. Adakah pengaruh penerimaan PKB sejak program unggulan tersebut diberlakukan?

“ Ada, sejak diberlakukan program Saminten penerimaan PKB semakin meningkat karena program tersebut sangat mempermudah masyarakat yang tidak bisa membayarkan pajak kendaraan berotornya di hari kerja”.

21. Bagaimanakah perkembangan pendapatan denda PKB di Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar?

“Mengalami kenaikan wakupun tidak secara signifikan”.

22. Apakah pendapatan denda PKB semakin bertambah semenjak program-program baru dan program unggulan Samsat Pematangsiantar diberlakukan?

“ Ya, Kenaikan jumlah penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor dapat disebabkan oleh adanya program unggulan samsat yang sangat membantu masyarakat mempermudah membayar pajak kendaraan bermotornya. Program tersebut yaitu Saminten (Sabtu Minggu Paten), dimana masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor di hari weekend sabtu dan minggu”.

23. Bagaimana sistem bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten?

“Sistem pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepala UPT Samsat Pematangsiantar untuk Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 70% dan untuk wilayah daerah Kota/Kabupaten sebesar 30%. Dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungut oleh Samsat Pematangsiantar akan diberikan secara keseluruhan kepada Provinsi. Pemerintah Provinsi lah yang berwernang untuk membagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah dibagi hasil pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Pematangsiantar kepada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar sebesar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi”.

24. Bagaimana hasil penerimaan PKB untuk Kota Pematangsiantar setelah bagi hasil?

”Berdasarkan hasil penelitian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah bagi hasil di Kota Pematangsiantar dari tahun 2015-2019 tidak mencapai target”.

25. Apakah penerimaan PKB untuk kota Pematangsiantar setiap tahunnya mencapai target?

“ Tidak”.

26. Jika tidak mencapai target apakah faktor yang memepengaruhi?

“kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam memenuhi kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya, banyaknya kendaraan masyarakat yang hilang atau rusak sehingga tidak membayarkan pajaknya lagi serta kurangnya

edukasi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mengajak masyarakatnya patuh membayar pajak”.

27. Apakah yang dilakukan oleh Samsat Pematangsiantar untuk meningkatkan penerimaan PKB khusus Kota Pematangsiantar?

“ Terus mengajak masyarakat untuk selalu membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya”.

28. Bagaimana Kontribusi Penerimaan PKB setelah bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar?

“Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi dimana pemerintah Kota/Kabupaten hanya mendapatkan 30% sedangkan 70% diberikan untuk Pemerintah Provinsi”.

29. Apakah penerimaan PKB tersebut sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar?

“Walaupun demikian Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi dengan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

30. Apa harapan Samsat Pematangsiantar terhadap masyarakat Kota Pematangsiantar mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

“ Lebih taat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, karena hasil pajak tersebut akan diperuntukkan kepada masyarakat yaitu untuk pembangunan daerah Kota Pematangsiantar”.



Wawancara dengan Kepala Samsat/UPPD Pematangsiantar



Wawancara dengan Bagian Sub Tata Usaha